

SIPUD (SISTEM PELAYANAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DESA) BERBASIS WEB PADA DESA PRINGKASAP

Tari Komalasari¹, Nining Suryani², Ilham Kurniawan³

¹²³Program Studi Sistem Informasi, Universitas Bina Sarana Informatika PSDKU Karawang
Jalan Banten No. 1, Karangpawitan Karawang

E-mail: tarikomalasari02@gmail.com, nining.nns@bsi.ac.id, ilham.imk@bsi.ac.id

Abstract – (MSME sector services can be more effective and efficient if accompanied by the development of technology that supports them. Making business certificates (SKU) at the Pringkasap Village office is still manual, bookkeeping reports are still recorded using handwriting, MSME data collection obtained from RT data collection is also not comprehensive. In addition, the lack of socialization regarding the program for submitting a halal logo on home products is the scope of this problem. Therefore, the authors designed a computerized website for creating SKUs and data collection for UMKM to facilitate data processing, both in adding, changing, deleting, storing and searching data. The author also includes the flow of the halal certification process on the website page to expand the socialization of the program.

Keywords: System Design, Business Certificate Making, MSME Data Collection, Halal Certification Socialization

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelayanan UMKM diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, salah satu program pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan di sektor UMKM adalah Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), selain pada sektor UMKM, program KUR juga digunakan untuk permodalan pada sektor pertanian (jual beli padi atau gabah) atau perikanan (budidaya).

Salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh peminjaman dari program KUR adalah memiliki surat keterangan usaha yang dapat diperoleh melalui Kantor Desa setempat.

Kendala yang dihadapi pada pelayanan UMKM Kantor Desa Pringkasap yaitu, adanya pemalsuan jenis usaha atau bukan usaha milik sendiri, pemohon yang mengajukan SKU terkadang tidak benar adanya mempunyai usaha tersebut sesuai dengan yang diajukan di dalam SKU. Pendataan usulan UMKM di Desa Pringkasap belum merata, dikarenakan kurangnya informasi yang didapatkan oleh pihak Kepala Desa, pendataan secara manual juga kurang efektif karena tidak menyeluruh. Selain itu, masyarakat belum mengetahui adanya program pengajuan logo halal pada produk rumahan bisa dibantu oleh kepala seksi kesejahteraan rakyat (Kasi. Kesra.) yang bekerja sama dengan pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) kecamatan. Kemudian kendala dalam pengajuan pembuatan surat yaitu pemohon terkadang merasa tidak enak jika tidak memberi uang administrasi, sedangkan pada pembuatan surat sebenarnya tidak dipungut biaya, melainkan jika ingin memberi bisa seikhlasnya. Selain itu, pemohon harus secara langsung

mendatangi Kantor Kepala Desa pada jam kerja saja (hari Senin sampai dengan hari Jumat) pukul 08.15 s.d. pukul 14.00 diluar jam kerja ataupun hari libur pembuatan SKU maupun surat keterangan lainnya tidak dilayani. Pemberian tanda tangan hanya bisa dilakukan Lurah dan atau Perangkat Desa seperti Sekretaris Desa, Kepala Seksi maupun Kepala Urusan. Sedangkan terkadang yang mempunyai wewenang tersebut belum datang atau ada urusan lain di luar wilayah Kantor Desa Pringkasap. Staf hanya bisa membuat suratnya saja, tidak berwenang untuk memberi tanda tangan.

Pengembangan teknologi yang semakin pesat adalah suatu hal yang harus juga diimbangi dengan fasilitas yang memadai agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, pelayanan pada pendataan usulan UMKM dapat lebih efektif dan efisien jika dibarengi dengan pengembangan teknologi yang mendukungnya.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mengatasi pemalsuan jenis usaha yang diajukan oleh pemohon pada SKU?
2. Bagaimana agar pendataan usulan UMKM bisa dilakukan secara menyeluruh?
3. Bagaimana proses pengajuan logo halal produk rumahan?
4. Bagaimana agar pembuatan SKU bisa lebih transparan dalam masalah uang administrasi.
5. Bagaimana agar pembuatan SKU bisa dimana saja dan kapan saja?
6. Bagaimana penggunaan barcode atau tanda tangan digital?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengatasi pemalsuan jenis usaha yang diajukan oleh pemohon pada SKU.
2. Pendataan usulan UMKM secara menyeluruh.
3. Pengajuan logo halal produk rumahan, bisa dibantu oleh Kasi. Kesra.
4. Pembuatan SKU yang lebih transparan dalam masalah uang administrasi.
5. Pembuatan SKU bisa dimana saja dan kapan saja.
6. Penggunaan barcode atau tanda tangan digital.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Sistem

Sistem adalah kesatuan jaringan kerja prosedural yang saling berhubungan, elemen tersebut saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu(Maulana et al., 2018).

Sistem adalah sekelompok komponen yang saling bergantung dan berfungsi untuk mencapai tujuan yang sama(Fridayanti, 2019).

2.2. Pengertian Informasi

Informasi adalah data yang dikelola menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh penerimanya, informasi ini merupakan fakta. Dalam transmisi data menjadi suatu informasi adalah proses dari masukan yang dikelola kemudian dapat menghasilkan keluaran(Maulana et al., 2018).

Informasi merupakan data yang diproses menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi penggunaanya dalam pengambilan keputusan (Asmara, 2019).

2.3. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan kumpulan langkah demi langkah yang terorganisasi dan apabila dilakukan dapat memberikan informasi untuk pengendalian organisasi atau untuk mengambil sebuah keputusan(Asmara, 2019).

Sistem informasi yaitu sekumpulan kegiatan prosedural yang diorganisasikan untuk penyediaan informasi dalam mengambil keputusan serta mengendalikan suatu organisasi (Kurniawan et al., 2021).

2.2 Pelayanan UMKM

Pelayanan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk melayani kepentingan umum sesuai dengan tata cara atau kebijakan yang telah ditetapkan, pelayanan memberikan sebuah kepuasan

meskipun tidak hanya berbentuk fisik (Ramadhani et al., 2019).

UMKM adalah salah satu jenis atau bidang usaha yang cukup penting untuk pertumbuhan ekonomi, UMKM juga memiliki peran dalam penyerapan tenaga kerja serta penyaluran hasil pembangunan (Soetjipto, 2020).

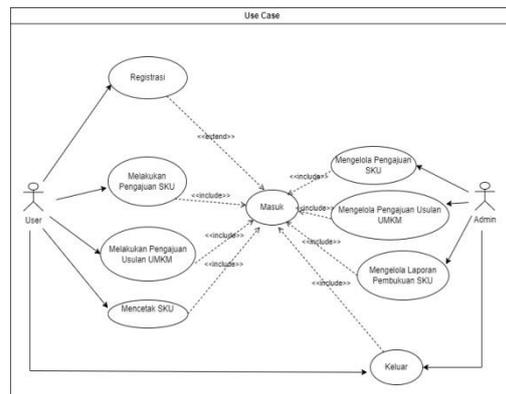
Surat Keterangan Usaha ialah surat yang dapat diperoleh dari kantor Desa, surat ini digunakan untuk menyatakan bahwa pemohon adalah benar merupakan warga setempat dan benar memiliki usaha yang tercantum dalam surat tersebut (Nurqolbiah et al., 2023).

Pendataan UMKM yang tertib dan transparan dapat meningkatkan jumlah data UMKM, karena kemudahan dalam sosialisasi dan pengoperasiannya, khususnya untuk pendataan (Muflikhah et al., 2022).

Pengembangan dan inovasi produk atau jasa potensial desa melalui penerapan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM bertujuan untuk menjamin kualitas produk dan penyaluran produk ke pasar ASEAN (Putra et al., 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan Usecase Diagram



Gambar 3. Use Case Diagram Sistem Usulan

1. Rancangan Antarmuka Halaman Utama User



Gambar 2. Halaman Utama User

2. Rancangan Antarmuka Halaman



Gambar 3. Halaman Pengajuan SKU User

3. Rancangan Antarmuka Halaman Riwayat SKU User



Gambar 4. Halaman Riwayat SKU User

4. Rancangan Antarmuka Halaman Pengajuan Usulan UMKM User



Gambar 5. Halaman Pengajuan Usulan UMKM User

5. Rancangan Antarmuka Halaman Utama Admin



Gambar 6. Halaman Utama Admin

6. Rancangan Antarmuka Halaman Surat Keterangan Usaha Admin



Gambar 7. Halaman SKU Admin

7. Rancangan Antarmuka Halaman Lihat



Gambar 8. Gambar Halaman Lihat Detail Surat

8. Rancangan Antarmuka Halaman Laporan Pembukuan SKU Admin



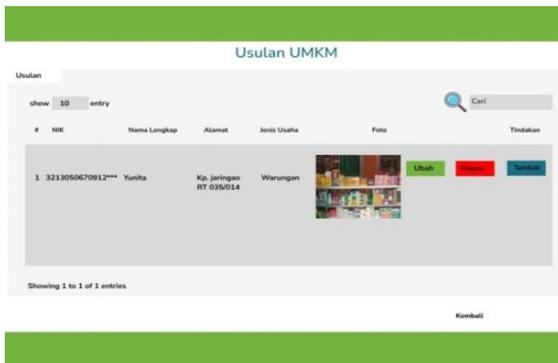
Gambar 9. Halaman Laporan Pembukuan SKU Admin

9. Rancangan Antarmuka Halaman Cetak Laporan Pembukuan SKU Admin



Gambar 10. Halaman Cetak Laporan Admin

10. Rancangan Antarmuka Halaman Usulan UMKM Admin



Gambar 11. Halaman Usulan UMKM Admin

IV. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Dalam proses pembuatan SKU di Kantor Desa Pringkasap masih dilakukan secara konvensional, adanya sistem yang sudah terkomputerisasi pemohon SKU dapat mengajukan pembuatan SKU secara mandiri, kapan saja dan dimana saja, kemudian pengecekan permohonan SKU akan dilakukan oleh staf, jika pengajuan surat memenuhi ketentuan seperti mencantumkan foto usaha sebagai bukti bahwa pemohon benar memiliki usaha tersebut, maka staf akan menambahkan tanda tangan digital berupa barcode pada surat tersebut, untuk selanjutnya SKU dapat dicetak langsung oleh pemohon.
2. Pada laporan pembukuan SKU pun masih dicatat menggunakan tulisan tangan, sehingga terlihat kurang rapi dan menyulitkan pencarian data dalam pembukuan tersebut, sistem yang sudah terkomputerisasi ini menjadikan laporan pembukuan dapat direkap langsung oleh sistem, untuk kemudian dapat dilihat dan dicetak langsung bila diperlukan.
3. Pendataan usulan UMKM yang dilakukan oleh RT dan masih menggunakan formulir dinilai kurang efektif, melalui sistem ini pendataan UMKM dapat dilakukan langsung oleh para pelaku usaha dengan cara menginputkan identitas diri dan identitas usahanya, termasuk para pelaku usaha yang sudah mendapatkan logo halal pada produknya. Dengan begitu, pendataan akan langsung tercatat pada sistem.
4. Sistem ini diharapkan dapat membantu kinerja pemerintahan Desa Pringkasap dalam pembuatan SKU, pembukuan hingga pelaporannya, beserta pendataan usulan UMKM yang diharapkan menjadi suatu upaya pengembangan UMKM di Desa Pringkasap.

4.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk peningkatan sistem adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem kepada masyarakat Desa Pringkasap, mengenai pembuatan SKU maupun pendataan usulan UMKM, selain itu sosialisasi mengenai persiapan logo halal produk makanan atau minuman di Desa Pringkasap perlu ditingkatkan lagi, mengingat baru ada dua pelaku usaha yang berhasil mendapatkan logo halal melalui website Sihalal.
2. Pada pendataan usulan UMKM sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, contohnya untuk jenis usaha yang bergerak di bidang produk makanan atau minuman maka akan masuk ke bidang usaha kuliner, sedangkan untuk jenis usaha seperti budidaya ikan maka akan masuk ke bidang usaha perikanan.
3. Untuk laporan pembukuan SKU, sebaiknya dibuatkan folder yang berbeda per tahunnya.

DAFTAR REFERENSI

- Asmara, J. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 1–7.
- Frisdayanti, A. (2019). PERANAN BRAINWARE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Kurniawan, H., Apriliah, W., Kurnia, I., & Firmansyah, D. (2021). Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada SMK Bina Karya Karawang. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 14(4), 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35969/interkom.v14i4.78>
- Maulana, A., Sadikin, M., & Izzuddin, A. (2018). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Inventaris Berbasis Web Di Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi – BPPT. *Jurnal Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-Elektronika-Telekomunikasi-Komputer*, Vol. 7 No., 182–196.
- Muflikhah, L., Yudistira, N., & Perdana, R. S. (2022). Web Responsif Pendataan Umkm Sebagai Sarana Peningkatan Potensi Desa Ngijo Karangploso. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 28(3), 364–370.
- Nurqolbiah, N., Malfiany, R., & Suherman, Y. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Usaha Pada Kelurahan Karangpawitan. *Dirgamaya :*

- Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*, Vol. 2 No., 30–37.
- Putra, A. B. N. R., Ulfatin, N. U., Wahyuni, W. W., & Sumarli, S. (2022). PEMBINAAN EKONOMI KREATIF UMKM DESA SUMBERDEM MELALUI PENDAMPINGAN NIB, SERTIFIKASI HALAL DAN BPOM. *Prosiding Hapemas*, Vol. 3 No., 146–153.
- Ramadhani, O., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2019). Studi Tentang Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Umum Terpadu (Siput) Pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. *EJournal Administrasi Negara*, 7(1), 8634–8648.
- Soetjipto, H. N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. K-Media.
- Asmara, J. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Netpala). *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*, 2(1), 1–7.
- Fridayanti, A. (2019). PERANAN BRAINWARE DALAM SISTEM INFORMASI MANAJEMEN. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Sistem Informasi*, 60–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Kurniawan, H., Apriliah, W., Kurnia, I., & Firmansyah, D. (2021). Penerapan Metode Waterfall Dalam Perancangan Sistem Informasi Penggajian Pada SMK Bina Karya Karawang. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 14(4), 13–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.35969/interkom.v14i4.78>
- Maulana, A., Sadikin, M., & Izzuddin, A. (2018). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Inventaris Berbasis Web Di Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi – BPPT. *Jurnal Setrum : Sistem Kendali-Tenaga-Elektronika-Telekomunikasi-Komputer*, Vol. 7 No., 182–196.
- Muflikhah, L., Yudistira, N., & Perdana, R. S. (2022). Web Responsif Pendataan Umkm Sebagai Sarana Peningkatan Potensi Desa Ngijo Karangpulo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 28(3), 364–370.
- Nurqolbiah, N., Malfiany, R., & Suherman, Y. (2023). Sistem Informasi Pelayanan Permohonan Surat Keterangan Usaha Pada Kelurahan Karangpawitan. *Dirgamaya : Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi*, Vol. 2 No., 30–37.
- Putra, A. B. N. R., Ulfatin, N. U., Wahyuni, W. W., & Sumarli, S. (2022). PEMBINAAN EKONOMI KREATIF UMKM DESA SUMBERDEM MELALUI PENDAMPINGAN NIB, SERTIFIKASI HALAL DAN BPOM. *Prosiding Hapemas*, Vol. 3 No., 146–153.
- Ramadhani, O., Irawan, B., & Prakoso, C. T. (2019). Studi Tentang Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Umum Terpadu (Siput) Pada Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang. *EJournal Administrasi Negara*, 7(1), 8634–8648.
- Soetjipto, H. N. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur Melintasi Pandemi COVID-19*. K-Media.

IDENTITAS PENULIS

Nama : Tari Komalasari
 NIDN/NIK : -
 TTL : Subang, 02 Januari 2002
 Golongan / Pangkat : -
 Jabatan Fungsional : -
 Alamat Rumah : -
 Telp. : 083816017831
 Email : tarikomalasari02@gmail.com

Nama : Nining Suryani
 NIDN/NIK : 0306017902
 TTL : Jakarta, 6 Januari
 Golongan / Pangkat : Penata Muda Tk. I
 Jabatan Fungsional : Lektor
 Alamat Rumah : Parung Bingung Rt.002/013
 Telp. : 081280093730
 Email : nining.nns@bsi.ac.id

Nama : Ilham Kurniawan
 NIDN/NIK : 0306069501
 TTL : Sukabumi, 06 Juni 1995
 Golongan / Pangkat : Penata Muda III/c
 Jabatan Fungsional : Asisten Ahli 150
 Alamat Rumah : Perum Mutiara Alam Permai
 Telp. : 0816619179
 Email : ilham.imk@bsi.ac.id